

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut PSAK No 16 laporan keuangan merupakan bagian penting dalam sebuah perusahaan. Tujuan pelaporan keuangan bertujuan umum adalah untuk menyediakan informasi keuangan tentang entitas pelapor yang berguna untuk investor saat ini dan investor potensial, pemberi pinjaman, dan kreditor lainnya dalam membuat keputusan tentang penyediaan sumber daya kepada entitas (SAK, 2018). Laporan keuangan merupakan sarana yang digunakan oleh para pihak yang berkepentingan (*stockholders*) untuk memperoleh informasi perihal keuangan, kinerja perusahaan, dan digunakan sebagai salah satu acuan dalam pengambilan keputusan, maka dari itu laporan keuangan yang disajikan oleh entitas bisnis diharapkan memiliki jaminan kewajaran dan kebenaran. Laporan keuangan yang memiliki status wajar akan lebih dipercaya dan diterima oleh para pihak yang berkepentingan, untuk mengetahui status kewajaran dari laporan keuangan tersebut diperlukan proses audit atas laporan keuangan.

Audit atas laporan keuangan menjadi sebuah hal yang sangat penting sekali, hal ini dikarenakan audit dapat memberikan kepercayaan yang lebih kepada para pihak yang berkepentingan, baik dari pihak internal maupun pihak eksternal. Menurut SA 200 tujuan suatu audit adalah untuk meningkatkan tingkat keyakinan pengguna laporan keuangan yang dituju. Hal ini dicapai melalui pernyataan suatu opini oleh auditor tentang apakah laporan keuangan disusun, dalam semua hal yang material, sesuai dengan suatu kerangka pelaporan keuangan yang berlaku (SPAP, 2016).

Salah satu komponen yang tersaji dalam laporan keuangan adalah aset tetap perusahaan. Setiap perusahaan pasti memiliki aset tetap untuk melaksanakan kegiatan operasional perusahaan. Aset tetap mempunyai sifat relatif permanen dan digunakan dalam kegiatan pengelolaan perusahaan secara normal. Contoh aset tetap antara lain adalah properti, bangunan, pabrik, alat-alat transportasi,

mesin, kendaraan bermotor, furnitur, perlengkapan kantor, dan lain-lain. Aset tetap merupakan salah satu akun yang mempunyai nilai material, maka adanya kesalahan pencatatan, perhitungan, penyajian yang material dapat memengaruhi pengambilan keputusan. Hal ini sangat merugikan baik oleh perusahaan sendiri maupun oleh pihak eksternal. Untuk itu diperlukan audit untuk mengetahui kewajaran aset tetap pada laporan keuangan.

Kewajaran laporan keuangan dinilai berdasarkan asersi yang terkandung dalam laporan keuangan, dalam hal ini adalah aset tetap. Asersi yang dimaksudkan meliputi asersi tentang keberadaan, asersi tentang kelengkapan, asersi hak dan kewajiban, asersi tentang penilaian atau alokasi, dan asersi tentang penyajian dan pengungkapan. Pengujian asersi tersebut akan dilakukan melalui prosedur audit aset tetap.

PT ABC merupakan perusahaan yang bergerak di bidang peminjaman kredit untuk membantu akses bagi usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKM) untuk masuk ke perbankan. Dalam melakukan kegiatan operasional perusahaan PT ABC memiliki berbagai macam aset tetap yang terdiri dari berbagai macam inventaris kantor dan kendaraan dinas. Keberadaan aset tetap tersebut memerlukan pemeriksaan dari pihak eksternal untuk mengetahui kewajarannya. Maka berdasarkan latar belakang masalah tersebut penulis ingin membahas lebih dalam mengenai prosedur audit aset tetap pada PT ABC oleh Kantor Akuntan Publik Supoyo, Sutjahjo, Subyantara & Rekan.

1.2 Landasan Teori

1.2.1 Pengertian Audit

Menurut Agoes (2012:4), auditing adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.

Menurut Arens, dkk (2017:4) audit adalah pengumpulan data dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian

antara informasi itu dan kriteria yang telah ditetapkan. Audit harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen.

Dari definisi audit tersebut bahwa suatu proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti mengenai informasi yang didapat dengan segala kriteria yang telah ditentukan, pemeriksaan juga harus dilakukan oleh seorang yang independen dan berkompoten dalam bidang audit.

1.2.2 Standar Audit

Menurut SA 200 standar audit berisi tujuan, ketentuan, serta materi penerapan dan penjelasan lain yang dirancang untuk mendukung auditor dalam memperoleh keyakinan memadai. Standar audit ini mengharuskan auditor untuk menggunakan pertimbangan profesional dan memelihara skeptisme profesional selama perencanaan dan pelaksanaan audit, dan antara lain mencakup :

1. Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, berdasarkan suatu pemahaman atas entitas dan lingkungannya, termasuk pengendalian internal entitas.
2. Memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang apakah terdapat kesalahan penyajian material, melalui perancangan dan penerapan respons yang tepat terhadap risiko yang dinilai.
3. Merumuskan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan kesimpulan yang ditarik pada bukti audit yang diperoleh. (SPAP, 2016)

1.2.3 Tujuan Audit

Menurut SA 200 tujuan suatu audit adalah untuk meningkatkan tingkat keyakinan pengguna laporan keuangan yang dituju. Hal ini dicapai melalui pernyataan suatu opini oleh auditor tentang apakah laporan keuangan disusun, dalam semua hal yang material, sesuai dengan suatu kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Dalam hal kebanyakan kerangka bertujuan umum, opini tersebut adalah tentang apakah laporan keuangan disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka. Suatu audit yang dilaksanakan

berdasarkan SA dan ketentuan etika yang relevan memungkinkan auditor untuk merumuskan opini. (SPAP, 2016)

Kewajaran laporan keuangan dinilai berdasarkan asersi yang terkandung dalam laporan keuangan. Asersi adalah pernyataan manajemen yang terkandung di dalam komponen laporan keuangan. Pernyataan tersebut dapat bersifat implisit atau eksplisit serta dapat di klasifikasikan berdasarkan penggolongan besar sebagai berikut :

1. Asersi tentang keberadaan atau kejadian atau kejadian berhubungan dengan apakah aktiva atau uang entitas pada tanggal tertentu dan apakah transaksi yang dicatat telah terjadi selama periode tertentu
2. Asersi tentang kelengkapan berhubungan dengan apakah semua transaksi dan akun yang seharusnya disajikan dalam laporan keuangan telah dicantumkan di dalamnya.
3. Asersi tentang hak dan kewajiban berhubungan dengan apakah aktiva merupakan hak entitas dan utang merupakan kewajiban perusahaan pada tanggal tertentu.
4. Asersi tentang penilaian atau alokasi berhubungan dengan apakah komponen-komponen aktiva, kewajiban, pendapatan dan biaya sudah dicantumkan dalam laporan keuangan pada jumlah yang semestinya.
5. Asersi tentang penyajian dan pengungkapan berhubungan dengan apakah komponen tertentu laporan keuangan diklasifikasikan, dijelaskan, dan diungkapkan semestinya.

1.2.4 Bukti Audit

Menurut SA 500 untuk merancang dan melaksanakan prosedur audit sedemikian rupa, auditor perlu memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk dapat menarik kesimpulan memadai sebagai basis opini auditor.

Kecukupan dan ketepatan bukti audit saling berhubungan satu dengan yang lainnya.

1. Kecukupan adalah ukuran kuantitas bukti audit. Kuantitas bukti audit yang dibutuhkan dipengaruhi oleh penilaian auditor atas resiko kesalahan

penyajian material (semakin banyak resiko semakin banyak bukti audit yang dibutuhkan) dan kualitas bukti audit (semakin baik kualitas bukti audit, semakin sedikit bukti yang dibutuhkan). Namun, pemerolehan bukti audit yang semakin banyak tidak dapat mengompensasi buruknya kualitas bukti audit tersebut.

2. Ketepatan merupakan ukuran kualitas bukti audit, yang mencakup, relevansi dan keandalan bukti audit yang mendukung auditor untuk merumuskan opininya. Keandalanbukti audit dipengaruhi oleh sumber dan sifatnya, serta bergantung pada masing-masing kondisi bukti audit yang diperoleh.

Berdasarkan SA 500 prosedur audit untuk memperoleh bukti audit dapat mencakup :

1. Inspeksi

Inspeksi mencakup pemeriksaan atas catatan atau dokumen, baik internal maupun eksternal, dalam bentuk kertas, elektronik, atau media lain, atau pemeriksaan fisik atas suatu aset. Inspeksi atas catatan dan dokumen memberikan bukti audit dengan beragam tingkat keandalan, bergantung pada sifat dan sumbernya, serta, dalam kasus catatan dan dokumen internal, epektifitas pengendalian atas penyusunan catatan atau dokumen tersebut.

2. Observasi

Observai terdiri dari melihat langsung suatu proses atau prosedur yang dilakukan oleh orang lain, sebagai contoh observasi oleh auditor atas penghitungan persediaan yang dilakukan oleh personal entitas, atau melihat langsung pelaksanaan aktivitas pengendalian. Observasi memberikan bukti audit tentang pelaksanaan suatu proses atau prosedur, namun hanya terbatas pada titik waktu tertentu pada saat observasi dilaksanakan, dan fakta bahwa adanya observasi atas aktivitas tersebut dapat memengaruhi bagaimana proses atau prosedur tersebut dilaksanakan.

3. Konfirmasi Eksternal

Konfirmasi eksternal merupakan bukti audit yang diperoleh auditor sebagai respons langsung tertulis dari pihak ketiga (pihak yang mengonfirmasi), dalam bentuk kertas, atau secara elektronik, atau media lain. Prosedur

konfirmasi eksternal seringkali relevan untuk mencapai asersi yang berhubungan dengan saldo akun tertentu dan unsur-unsurnya.

4. Perhitungan Ulang

Perhitungan ulang terdiri dari pengecekan akurasi penghitungan matematis dalam dokumen atau catatan. Penghitungan ulang dapat dilakukan secara manual atau secara elektronik.

5. Pelaksanaan Kembali

Pelaksanaan kembali adalah pelaksanaan prosedur atau pengendalian secara independen oleh auditor yang semula merupakan bagian pengendalian intern entitas.

6. Prosedur Analitis

Prosedur analitis terdiri dari pengevaluasian atas informasi keuangan yang dilakukan dengan menelaah hubungan yang dapat diterima antara data keuangan dengan data nonkeuangan. Prosedur analitis juga meliputi investigasi atas fluktuasi yang telah diidentifikasi, hubungan yang tidak konsisten antara satu informasi dengan informasi lainnya, atau data keuangan yang menyimpang secara signifikan dari jumlah yang telah diprediksi sebelumnya.

7. Permintaan Keterangan

Permintaan keterangan terdiri dari pencarian informasi atas orang yang memiliki pengetahuan, baik keuangan maupun non-keuangan, di dalam atau diluar entitas. Permintaan keuangan digunakan secara luas sepanjang audit sebagai tambahan untuk prosedur audit lainnya. Permintaan keterangan dapat berupa permintaan keterangan resmi secara tertulis maupun permintaan keterangan secara lisan. Pengevaluasian respons atas permintaan keterangan ini merupakan bagian terpadu proses permintaan keterangan. (SPAP, 2016)

1.2.5 Aset Tetap

1.2.5.1 Pengertian

Menurut PSAK No 16 aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif, dan diperkirakan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. (SAK, 2018)

Menurut Agoes (2012:270) Beberapa sifat atau ciri aset tetap adalah :

1. Tujuan dan pembeliannya bukan untuk dijual kembali atau diperjualbelikan sebagai barang dagangan, tetapi untuk dipergunakan dalam kegiatan operasional perusahaan.
2. Mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
3. Jumlahnya cukup material.

1.2.5.2 Biaya Perolehan

Berdasarkan PSAK No 16 biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar dari imbalan lain yang diserahkan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi atau, jika dapat diterapkan, jumlah yang diatribusikan pada aset ketika pertama kali diakui sesuai dengan persyaratan tertentu dalam PSAK lain.

Biaya perolehan aset tetap diakui sebagai aset jika dan hanya jika :

1. Kemungkinan besar entitas akan memperoleh manfaat ekonomik masa depan dari aset tersebut.
2. Biaya perolehannya dapat diukur secara andal

Biaya perolehan aset tetap meliputi :

1. Harga perolehannya, termasuk bea impor dan pajak pembelian yang tidak dapat dikreditkan setelah dikurangi diskon dan potongan lain.
2. Setiap biaya dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan supaya aset tersebut siap digunakan sesuai dengan intensi manajemen.
3. Estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset tetap, kewajiban tersebut timbul ketika aset tetap

diperoleh atau sebagai konsekuensi penggunaan aset tetap selama periode tertentu untuk tujuan selain untuk memproduksi persediaan selama periode tersebut. (SAK, 2018).

1.2.5.3 Penyusutan

Menurut PSAK No 16 setiap bagian dari aset tetap yang memiliki biaya perolehan cukup signifikan terhadap total biaya perolehan seluruh aset tetap disusutkan secara terpisah. Bagian yang signifikan dari aset tetap mungkin memiliki umur manfaat dan metode penyusutan yang sama dengan umur manfaat dan metode penyusutan bagian signifikan lain dari aset tersebut. Bagian tersebut dapat dikelompokkan dalam penentuan beban penyusutan. Beban penyusutan untuk setiap periode diakui dalam laba rugi, kecuali jika beban tersebut termasuk dalam jumlah tercatat aset lain. Jumlah tersusutkan dari suatu aset dialokasikan secara sistematis sepanjang umur manfaatnya.

Metode penyusutan yang digunakan mencerminkan pola pemakaian manfaat ekonomik masa depan aset yang diharapkan oleh entitas. Berbagai metode penyusutan dapat digunakan untuk mengalokasikan jumlah tersusutkan dari aset secara sistematis selama umur manfaatnya. Metode tersebut antara lain

1. Metode garis lurus

Metode penyusutan garis lurus menghasilkan pembebanan yang tetap selama umur manfaat aset jika nilai residunya tidak berubah.

2. Metode saldo menurun

Metode saldo menurun menghasilkan pembebanan yang menurun selama umur manfaat aset.

3. Metode unit produksi

Metode unit produksi menghasilkan pembebanan berdasarkan pada penggunaan atau output yang diperkirakan dari aset.

Entitas memilih metode yang paling mencerminkan pola pemakaian yang diperkirakan atas manfaat ekonomik masa depan aset. Metode tersebut diterapkan secara konsisten dari periode ke periode, kecuali terdapat perubahan

dalam pola pemakaian manfaat ekonomik masa depan yang diperkirakan aset tersebut. (SAK, 2018)

1.2.5.4 Penghentian Pengakuan

Menurut PSAK No 16 jumlah tercatat aset tetap yang dihentikan pengakuannya adalah sebagai berikut :

1. Pada saat pelepasan
2. Ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomik masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya.

Keuntungan atau kerugian timbul dari penghentian pengakuan aset tetap dimasukkan dalam laba rugi ketika aset tetap tersebut dihentikan pengakuannya. Keuntungan tidak boleh diklasifikasikan sebagai pendapatan. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan aset tetap ditentukan sebesar selisih antara jumlah hasil pelepasan neto, jika ada, dan jumlah tercatatnya. Pelepasan aset tetap dapat dilakukan dengan berbagai cara (contohnya: dijual, disewakan dalam sewa pembiayaan, atau disumbangkan). (SAK, 2018)

Menurut Warren, dkk (2014,473) Aset tetap yang tidak lagi berguna dapat dibuang atau dijual. Dalam kasus seperti ini, aset tetap dihapus dari akun. Hanya karena aset tetap didepresiasi penuh, bagaimanapun, tidak berarti bahwa aset tersebut harus dihapus dari akun. Jika aset tetap masih digunakan, biaya dan akumulasi penyusutannya akan tetap ada di dalam buku besar bahkan jika aset tersebut disusutkan. Ini menjaga akuntabilitas untuk aset dalam buku besar. Jika aset dihapus dari buku besar, akun tidak akan berisi bukti tentang keberlanjutan keberadaan aset. Selain itu, data biaya dan akumulasi penyusutan atas aset tersebut sering diperlukan untuk laporan pajak properti dan pajak penghasilan.

1.2.6 Tujuan Audit Aset Tetap

Menurut Agoes (2012:272) dalam suatu pemeriksaan umum, pemeriksaan atas aset tetap mempunyai beberapa tujuan sebagai berikut:

1. Untuk memeriksa apakah terdapat internal control yang cukup baik atas aset tetap.
2. Untuk memeriksa apakah aset tetap yang tercantum di laporan posisi keuangan (neraca) betul-betul ada, masih digunakan dan dimiliki oleh perusahaan.
3. Untuk memeriksa apakah penambahan aset tetap dalam tahun berjalan (periode yang diperiksa) betul-betul merupakan suatu Capital Expenditure, diotorisasi oleh pejabat perusahaan yang berwenang didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan dicatat dengan benar.
4. Untuk memeriksa apakah diposal (penarikan) aset tetap sudah dicatat dengan benar di buku perusahaan dan telah diotorisasi oleh pejabat yang berwenang.
5. Untuk memeriksa apakah pembebanan penyusutan dalam tahun (periode) yang diperiksa dilakukan dengan cara yang sesuai dengan SAK, konsisten, dan apakah perhitungannya telah dilakukan dengan benar (secara akurat).
6. Untuk memeriksa apakah ada aset tetap yang dijadikan sebagai jaminan.
7. Untuk memeriksa apakah penyajian aset tetap dalam laporan keuangan, sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia (SAK/ETAP/IFRS).

1.2.7 Prosedur Audit Aset tetap

Menurut Agoes (2012:273) prosedur audit aset tetap adalah sebagai berikut:

1. Pelajari dan evaluasi *internal control* atas aset tetap
2. Minta kepada klien *Top Schedule* serta *Supporting Schedule* aset tetap, yang berisikan: saldo awal, penambahan serta pengurangan-pengurangannya dan saldo akhir, baik untuk harga perolehan maupun akumulasi penyusutannya.
3. Periksa *footing* dan *cross footingnya* dan cocokkan totalnya dengan *General Ledger* atau *Sub-Ledger*, saldo awal dengan *working paper* tahun lalu.
4. *Vouch* penambahan serta pengurangan dari aset tetap tersebut. Untuk penambahan kita lihatnya *approvalnya* dan kelengkapan *supporting*

documentnya. Untuk pengurangan kita lihat otoritasnya dan jurnalnya apakah sudah dicatat dengan betul, misalnya bila ada keuntungan atau kerugian atas penjualan aset tetap tersebut. Selain itu periksa juga penerimaan hasil penjualan aset tetap tersebut.

5. Periksa fisik dari aset tetap tersebut (dengan cara tes basis) dan periksa kondisi dan nomor kode dari aset tetap
6. Periksa bukti pemilikan aset tetap.
Untuk tanah, gedung, periksa sertifikat tanah dan IMB (Izin Mendirikan Bangunan) serta SIPB (Surat Izin Penempatan Bangunan).
Untuk mobil, motor, periksa BPKB, STNK-nya.
7. Pelajari dan periksa apakah *Capitalization Policy* dan *Depreciation Policy* yang dijalankan konsisten dengan tahun sebelumnya.
8. Buat analisis tentang perkiraan *Repair & Maintenance*, sehingga kita dapat mengetahui apakah ada pengeluaran yang seharusnya masuk dalam kelompok *Capital Expenditures* tetapi dicatat sebagai *Revenue Expenditures*.
9. Periksa apakah aset tetap tersebut sudah diasuransikan dan apakah *Insurance Coveragenya* cukup atau tidak.
10. Tes perhitungan penyusutan, *cross reference* angka penyusutan dengan biaya penyusutan diperkirakan laba rugi dan periksa alokasi/distribusi biaya penyusutan.
11. Periksa notulen rapat, perjanjian kredit, jawaban konfirmasi dari bank, untuk memeriksa apakah ada aset tetap yang dijadikan sebagai jaminan atau tidak.
Bila ada, maka hal ini perlu diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.
12. Periksa apakah ada *Commitment* yang dibuat oleh perusahaan untuk membeli atau menjual aset tetap.
13. Untuk *Contruction in Progress*, kita periksa penambahannya apakah ada *Construction in progress* yang harus di transfer ke aset tetap.

14. Jika ada aset tetap yang diperoleh melalui *leasing*, periksa *lease agreement* dan periksa apakah *accounting treatment*nya sudah sesuai dengan standar akuntansi *leasing*.
15. Periksa atau tanyakan apakah ada aset tetap yang dijadikan agunan kredit di bank.
16. Periksa penyajiannya dalam laporan keuangan, apakah sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia (SAK/ETAP/IFRS).

1.3 Tujuan Penyusunan Laporan Tugas Akhir

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan laporan Tugas Akhir adalah sebagai berikut :

1. Untuk menerapkan ilmu dan teori yang diperoleh pada masa perkuliahan dengan melakukan praktik di dunia kerja yang sesungguhnya.
2. Menerapkan kemampuan *hard skill* dan *soft skill* yang diperoleh selama masa perkuliahan di tempat praktik kerja lapangan
3. Memperoleh pengalaman kerja di Kantor Akuntan Publik
4. Mengetahui prosedur audit aset tetap yang dilakukan pada saat melakukan audit terhadap suatu perusahaan.
5. Memenuhi syarat kelulusan dari program studi Diploma III Akuntansi Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.

1.4 Manfaat Penyusunan Laporan Tugas Akhir

Dengan disusunnya laporan tugas akhir ini diharapkan memberi manfaat pada berbagai pihak yang terkait, yaitu :

1. Bagi Penulis
 - a. Memperoleh pengalaman bekerja di KAP Supoyo, Sutjahjo, Subyantara & Rekan.
 - b. Memperluas wawasan pengetahuan, kemampuan, dan tanggung jawab yang diterapkan dalam dunia kerja.
 - c. Menambah keterampilan untuk meningkatkan potensi akademik yang dimiliki penulis.

- d. Mengetahui secara langsung penerapan prosedur audit aset tetap yang dilakukan oleh auditor di lapangan.
 - e. Sebagai media untuk menerapkan ilmu audit yang diperoleh pada masa perkuliahan.
 - f. Mempelajari secara langsung etika menjadi auditor yang baik
2. Bagi Jurusan D-III Akuntansi Universitas Airlangga
 - a. Untuk meningkatkan kualitas mahasiswa D-III Akuntansi Universitas Airlangga.
 - b. Dapat meningkatkan kerjasama dengan instansi tempat mahasiswa melaksanakan praktik kerja lapangan.
 - c. Sarana mengenalkan kualitas mahasiswa D-III Akuntansi Universitas Airlangga kepada instansi tempat mahasiswa melaksanakan praktik kerja lapangan.
 3. Bagi tempat pelaksanaan praktik kerja lapangan
 - a. Sebagai sarana penghubung/kerjasama antara instansi dengan perguruan tinggi khususnya dari D-III Akuntansi Universitas Airlangga.
 - b. Sebagai bentuk peran aktif suatu instansi terhadap peningkatan kualitas pendidikan khususnya perguruan tinggi.
 4. Bagi pembaca
 - a. Sebagai bahan bacaan yang diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan tentang pengauditan, khususnya prosedur audit aset tetap.
 - b. Dapat digunakan sebagai referensi dalam pelaksanaan kegiatan serupa di masa yang akan datang.

1.5 Kegiatan Penyusunan Tugas Akhir

Data dan informasi yang tercantum dalam Laporan Tugas Akhir berasal dari kegiatan Praktik Kerja Lapangan yang dilaksanakan di Kantor Akuntan Publik Supoyo, Sutjahjo, Subyantara & Rekan. Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan

selama 8 minggu sejak tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan 28 Februari 2020. Dilaksanakan sesuai jam kantor yaitu lima hari kerja dalam satu minggu. Kegiatan Praktik Kerja Lapangan dimulai pada pukul 08.00 WIB dan berakhir sampai dengan pukul 16.30 WIB.

Tabel 1.1 Jadwal Kegiatan Praktik Kerja Lapangan

No.	Kegiatan	2019					2020						
		8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	
1	Survei tempat PKL	■											
2	Penyusunan proposal PKL	■											
3	Pengajuan proposal PKL ke KAP		■										
4	Pelaksanaan PKL						■	■					
5	Pembagian dosen pembimbing						■						
6	Bimbingan dengan dosen pembimbing							■	■	■	■	■	
7	Penyusunan laporan PKL dan TA							■	■	■	■	■	
8	Presentasi												■
9	Penyerahan laporan PKL dan TA											■	